



Fieka Nurul Arifa

Analis Legislatif Ahli Muda

fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada sesi Sidang Umum UNESCO ke-43 di Samarkand, Uzbekistan, 4 November 2025, Bahasa Indonesia resmi digunakan sebagai bahasa kerja dalam sidang utama. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Abdul Mu'ti, menyampaikan pernyataan nasional dalam bahasa Indonesia pada forum tersebut, menegaskan bahwa bahasa Indonesia "membawa semangat persaudaraan antarbangsa". Pengakuan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang mengusung bahasa nasionalnya sebagai instrumen global. Momen ini merupakan manifestasi konkret dari diplomasi kebahasaan Indonesia yang telah berlangsung sejak 2022.

Penggunaan bahasa Indonesia secara resmi pada forum UNESCO menandai tonggak baru diplomasi kebahasaan Indonesia. Keputusan Sidang Umum UNESCO ke-42 pada 20 November 2023 telah menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10 di lembaga tersebut. Pengakuan tersebut memberikan legitimasi internasional yang mendalam terhadap bahasa Indonesia sebagai instrumen global, sekaligus meningkatkan tanggung jawab Indonesia dalam pelestarian dan pengembangannya.

Dalam konteks diplomasi budaya, langkah ini memberi efek strategis. Bahasa Indonesia kini dapat digunakan dalam dokumen dan sidang multilateral, memperkuat citra Indonesia sebagai aktor global yang tidak hanya menggunakan bahasa asing sebagai media, tetapi juga menonjolkan bahasa nasionalnya. Hal ini sekaligus membuka jalan bagi penguatan *soft power* Indonesia melalui *lingua franca* kebudayaan dan pendidikan.

Dalam konteks pendidikan dan penelitian, penggunaan bahasa Indonesia tidak lagi terbatas sebagai bahasa nasional, melainkan juga medium komunikasi internasional dan diplomasi. Data terkini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah diajarkan di 54 negara dengan lebih dari 300 lembaga dan sekitar 172 ribu peserta aktif dalam program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Bahkan, sejumlah negara yang kini menjadikan bahasa Indonesia sebagai bagian pengajaran atau program studi luar negeri.

Di Tokyo University terdapat Departemen Bahasa Indonesia sebagai bagian dari Studi Asia Tenggara. Di Hankuk University juga terdapat program *Indonesian Language Department* dalam *Oriental Language Programme* mereka. Di Inggris, SOAS University of London memiliki *Department of Southeast Asia* yang menawarkan studi bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Program-intensif bahasa Indonesia juga ditawarkan di banyak negara melalui program seperti *Australian Consortium for 'In-Country' Indonesian Studies* (ACICIS) yang bekerja sama dengan universitas di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi dan penyebaran bahasa Indonesia di luar negeri semakin nyata, yang sekaligus menjadi modal kuat untuk pengakuan internasional.

Meski demikian, bahasa Indonesia tetap menghadapi tantangan nyata dan tak dapat diabaikan. Digitalisasi komunikasi membawa ragam bahasa baru, seperti bahasa gaul, istilah asing, dan singkatan yang tersebar di media sosial, yang dapat menurunkan kualitas penggunaan bahasa baku.

Dominasi bahasa global seperti Inggris masih kuat dalam ranah akademik dan publikasi ilmiah. Oleh karena itu, strategi pelestarian harus mencakup adaptasi terhadap dunia digital sambil menjaga integritas bahasa baku.

Menindaklanjuti tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi pelestarian yang dapat ditempuh, di antaranya, *pertama*, pemerintah perlu menyelaraskan pendidikan kebahasaan dengan agenda internasional, termasuk literasi digital dan penguasaan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan. *Kedua*, pemanfaatan media dan teknologi sebagai jembatan promosi bahasa, melalui konten digital, platform daring, dan pendidikan jarak jauh yang kreatif. *Ketiga*, pelibatan komunitas dan kreator lokal serta diaspora secara aktif sebagai agen penyebaran bahasa dan budaya di luar ranah formal guna memperkuat relevansi dan cakupan global bahasa Indonesia.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan hak bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan instrumen diplomasi internasional terlaksana secara efektif. Langkah tersebut mencakup penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan formal, administrasi, dan diplomasi, serta pengawasan pelaksanaan program literasi dan diplomasi kebahasaan pemerintah. Komisi X DPR RI juga dapat mendorong pengembangan program studi bahasa Indonesia di universitas luar negeri, memperluas program BIPA, dan mendukung media digital serta konten kreatif untuk memperluas jangkauan bahasa secara global. Selain itu, pelibatan komunitas, diaspora, dan kreator nonpemerintah penting untuk memperkuat promosi dan pelestarian bahasa. Dukungan terhadap penelitian dan monitoring penggunaan bahasa Indonesia perlu dilakukan guna memastikan keberlanjutan secara sistematis dan terukur.

Sumber

antaranews.com, 7 November 2025;
indonesia.go.id, 6 November 2025.
Media Indonesia, 4 November 2025;
tempo.co, 5 November 2025;
usindo.org, 4 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

LAYOUTER

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Devindra Ramkas O.
Uilly Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Ekuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making

©PusakaBK2025